

## **Sinergi Bela Negara untuk Masa Depan Tanah Papua yang Gemilang Ganis Purnaningtyas<sup>1</sup>, Kamelia Nur Syamsiyah<sup>2</sup>, Ayu Wardani<sup>3</sup>**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis (1,2), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (3)

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

2010115045@mahasiswa.upnvj.ac.id (1), 2010115051@mahasiswa.upnvj.ac.id (2), ayuwardani@upnvj.ac.id (3)

Jl. Rs. Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12450, Indonesia

### **Abstrak**

Papua adalah salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan potensi alam. Hingga saat ini, daerah ini masih menjadi daerah tertinggal dalam hal pembangunan sosial ekonomi. Peningkatan akses informasi dan komunikasi di era digital menjadi semakin krusial dalam mendorong pertumbuhan di Papua. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi sinergi bela negara dalam memajukan masa depan Papua yang lebih gemilang, khususnya di bidang pembangunan digital. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, dengan metode pengumpulan data studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan masyarakat Papua terhadap perkembangan teknologi saat ini bercampur antara optimisme dan kekhawatiran akan dampak yang mungkin ditimbulkan. Implementasi sinergi bela negara menuju Papua yang gemilang, khususnya dalam bidang digitalisasi dapat dilakukan dalam bentuk implementasi komunikasi pembangunan melalui penguatan jaringan komunikasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Komunikasi pembangunan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital, mempercepat penetrasi teknologi, serta meningkatkan aksesibilitas dan inklusi digital di wilayah Papua.

**Kata Kunci:** Sinergi Bela Negara, Komunikasi Pembangunan, Papua, Sosial Ekonomi

### **Abstract**

*Papua is one of the provinces in Indonesia that is rich in natural resources. To date, this region remains underdeveloped in terms of socio-economic development. The improvement of information and communication access in the digital era is becoming increasingly crucial in driving growth in Papua. This research aims to understand the implementation of national defense synergy in advancing a more prosperous future for Papua, particularly in the field of digital development. The research method used is qualitative with a descriptive approach, employing literature study as the data collection method. The research findings indicate that the views of the Papua community regarding current technological advancements are mixed, ranging from optimism to concerns about potential impacts. The implementation of national defense synergy towards a brighter future for Papua, especially in the digitization field, can be achieved through the implementation of development communication by strengthening communication networks between the government, industry players, and the community. Development communication can create an environment conducive to digital economic growth, accelerate technology penetration, and enhance digital accessibility and inclusion in the Papua region.*

**Keywords:** National Defense Synergy, Development Communication, Papua, Socio-Economic

## PENDAHULUAN

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam (SDA). Papua menjadi salah satu provinsi yang memiliki beberapa daerah yang tertinggal dan menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal pembangunan sosial ekonomi. Di tengah berkembangnya teknologi digital, peningkatan akses informasi dan komunikasi menjadi kunci dalam mempercepat pertumbuhan di wilayah ini. Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar bagi individu untuk berpartisipasi dalam komunitas dan kelompok organisasi berbasis virtual, dengan fokus pada minat, ketertarikan, atau tujuan yang sama, termasuk dalam gerakan sosial (Putri I. R., 2022). Kadis Kominfo Provinsi Papua Jeri Agus Yudianto mengatakan, perkembangan pengguna internet menurut survei Asosiasi Pengguna Jasa Internet (APJI) di Indonesia tahun 2022 kurang lebih 210 juta jiwa dan di triwulan pertama 2023 ada kenaikan 5 juta orang yang terkoneksi dengan internet. Di Papua sendiri pertumbuhan pengguna internet berada di urutan terbawah yaitu hanya sebesar 65%, sementara wilayah lainnya sudah berada di atas 72,32 persen (Pemerintah Provinsi Papua, 2023).

Dalam era digital yang terus berkembang, peran komunikasi pembangunan menjadi semakin krusial dalam memajukan pembangunan sosial ekonomi di Papua. Peran pemerintah yang didukung oleh agen pembangunan dalam meningkatkan pembangunan di Papua merupakan suatu bentuk sinergi bela negara yang wajib menjadi perhatian. Pembangunan dalam ranah digitalisasi di Papua merupakan suatu bentuk pemerataan pembangunan. Bentuk dari sinergi bela negara di Papua dalam bidang pembangunan di era digital yakni mendorong akses informasi yang lebih luas, membangun kesadaran akan peluang ekonomi, dan menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang relevan. Komunikasi pembangunan dapat berfungsi sebagai pendorong utama untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperkuat jaringan sosial di antara masyarakat Papua.

Di Papua, khususnya di daerah pelosok dan pedesaan, penting bagi masyarakat untuk menerima informasi yang akurat, kredibel, dan transparan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini menunjukkan bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang tepat harus dihormati sehingga mereka dapat berperan aktif dalam proses pembangunan. Penerapan komunikasi pembangunan menjadi penting untuk diperhitungkan agar informasi tentang program ataupun kebijakan pemerintah dapat dikomunikasikan secara tepat sehingga masyarakat dapat mengetahui, memahami, dan berpartisipasi aktif (Sulistiani *et al.*, 2017).

Media teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi bagian penting dan strategis dalam proses interaksi sosial dan ekonomi sehingga tidak ada lagi batas jarak, ruang dan waktu selama media dan aksesnya tersedia. Setiap individu, kelompok, organisasi, baik dari sektor publik maupun swasta bisa memanfaatkan koneksi melalui teknologi media komunikasi berbasis internet seperti ponsel, komputer, dan laptop untuk memenuhi kebutuhan, menyebarkan informasi, memberikan edukasi, memperluas jejaring sosial, memberikan hiburan, dan bahkan memengaruhi serta membentuk opini publik. Dengan demikian, sistem jaringan komunikasi di era digital, melalui kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), menjadi suatu keharusan dan kebutuhan yang sangat penting dalam menghadapi tantangan globalisasi, demokratisasi, dan desentralisasi, terutama bagi pemerintah.

Pemerintah perlu secara aktif menyesuaikan diri dengan perkembangan ini, dengan menguasai dan memanfaatkan TIK melalui konsep *electronic government (e-gov)*, yang berfungsi sebagai alat untuk menyediakan informasi dan pelayanan publik, memungkinkan partisipasi masyarakat, memberdayakan warga, serta mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi pembangunan yang lebih merata, berkeadilan, dan sejahtera. Sistem jaringan komunikasi dalam konteks pembangunan perlu direvitalisasi dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang berkembang pesat di era digital. Namun, upaya ini masih memerlukan peningkatan, penyediaan, dan perluasan jaringan, fasilitas, serta kemampuan, terutama di wilayah Papua.

Adanya ketidakmerataan dalam infrastruktur digital menjadi salah satu hambatan dalam perkembangan sosial ekonomi di Papua. Provinsi Papua menjadi fokus utama dalam upaya pemerataan infrastruktur digital karena terpaut jauh dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Dalam berbagai aspek, seperti indikator ekonomi, sosial, demografi, dan infrastruktur digital, Papua masih berada di belakang jika dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain, terutama di Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan.

Skor Provinsi Papua tahun 2022 pada Indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

hanya sebesar 61,4% dan lebih rendah dari rata-rata skor nasional 72,9%. Tingkat kemiskinan tahun 2022 di Papua juga masih tinggi sebesar 26,8%, jauh di atas rata-rata nasional 9,8%. Begitu juga dengan indikator infrastruktur digital di Papua yang masih tertinggal dibandingkan dengan provinsi lainnya. Hal tersebut tercermin dari rendahnya indeks infrastruktur dan ekosistem digital tahun 2022 yang hanya 28,6% jauh di bawah indeks rata-rata nasional sebesar 41,5% (Iswara, 2023).

Pembangunan infrastruktur digital, menurut Ketua Umum Masyarakat Telekomunikasi (Mastel) Sarwoto Atmosutarno, merupakan proyek yang harus terus diprioritaskan karena memberikan banyak potensi bagi masyarakat. Terutama bagi masyarakat di wilayah 3T

termasuk Papua yang masih mengalami keterbatasan dalam konektivitas internet dan adanya ketimpangan dibandingkan provinsi lainnya di Indonesia. Menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, setidaknya terdapat 12 manfaat dari pembangunan infrastruktur digital. Sebagian di antaranya yaitu mendorong ekonomi digital, mendukung pemulihan dan perkembangan ekonomi nasional, pemerataan akses pendidikan, menciptakan peluang lapangan kerja baru, mempersatu bangsa, dan meningkatkan kualitas hidup serta pelayanan kesehatan. Komunikasi pembangunan memiliki peranan penting dalam mendorong ekonomi digital Papua yang menjadi salah satu implementasi transformasi digital oleh pemerintah.

Komunikasi yang efektif dapat memfasilitasi pertukaran informasi dan pengetahuan tentang peluang ekonomi digital kepada masyarakat. Selain itu, komunikasi yang baik juga membangun kesadaran akan pentingnya beradaptasi dengan teknologi baru, merangsang kolaborasi antara pelaku industri, dan mendorong inovasi di bidang ekonomi digital. Dengan memperkuat jaringan komunikasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat, komunikasi pembangunan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital, mempercepat penetrasi teknologi, serta meningkatkan aksesibilitas dan inklusi digital di berbagai sektor ekonomi.

Papua mengalami tantangan yang rumit dalam transformasi digital dikarenakan masih kuatnya pengaruh adat, budaya pemerintah yang rendah, rendahnya tingkat keamanan, tingkat kesulitan geografis yang tinggi, dan besarnya kesenjangan digital. Sistem kependudukan menjadi salah satu aspek penting dari transformasi digital yang harus ditopang, karena mempunyai peranan penting dalam pembangunan daerah. Dalam mewujudkan pemerataan pembangunan sebagai bentuk sinergi bela negara, maka dibutuhkan suatu upaya dalam mewujudkan hal tersebut, salah satunya melalui komunikasi pembangunan.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mencari wawasan yang lebih mendalam mengenai dinamika masyarakat (Newman et al. 2012). Teknik pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka (*library research*) yaitu metode pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian. Pengumpulan data dengan cara mencari sumber data yang berasal dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan riset-riset yang sudah ada (Fadli 2021).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Karakteristik Masyarakat Papua di Era Digital**

Kehidupan masyarakat saat ini telah terjadi perubahan yang signifikan karena adanya perkembangan teknologi di era digital ini dan teknologi yang terus berkembang ini tanpa sadar bisa menjadi ancaman. Ancaman tersebut muncul dikarenakan manusia yang terlalu terlena oleh kecanggihan dan kemudahan yang diberikan sehingga dapat menguasai manusia dan tidak terkontrol. Dari waktu ke waktu kemajuan teknologi komunikasi dan ilmu pengetahuan terus mengalami perubahan. Masyarakat saat ini merupakan masyarakat yang sudah mengalami banyak perubahan yang mengarah pada kemajuan di bidang teknologi informasi yang artinya masyarakat sudah termodernisasi. Salah satu modal pembangunan yaitu sumber daya manusia yang mempunyai peranan utama dalam

mendorong tercapainya tujuan pembangunan.

masyarakat sebagai makhluk sosial mempunyai potensi yang bisa dikembangkan guna mendukung pembangunan agar berhasil (Lestari *et al.*, 2023).

Masyarakat Papua sendiri merupakan masyarakat multikultural tercermin dari keragaman suku, adat istiadat, bahasa, kearifan lokal dan pengetahuan lokal yang menjadi kekuatan (energi) sosial masyarakat dalam mendukung pembangunan. Kearifan lokal, keragaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, nilai, dan norma yang dipercayai oleh masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi komunikasi pembangunan di era digital. Masyarakat pedesaan di Papua memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya dan terbuka (transparan) sesuai dengan implementasi Undang-Undang No 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini mengindikasikan bahwa, hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang tepat menjadi bagian dalam proses pembangunan. Masyarakat juga diharuskan mempunyai kesadaran akan tujuan, memperluas gagasan dan memanfaatkan ikatan solidaritas warga guna ketercapaian tujuan yang diinginkan. Kekuatan interaksi sosial yang dinamis di dalam kelompok masyarakat menjadi pilar utama yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembangunan, yakni menciptakan masyarakat yang berdaya, sejahtera, dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, tantangan signifikan dihadapi oleh masyarakat pedesaan, dengan segala keterbelakangan yang mereka hadapi, termasuk tingkat pendidikan yang rendah, keterbatasan prasarana dan sarana, akses informasi yang terbatas, serta rendahnya keterampilan atau kemampuan individu, yang secara langsung berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia (Sulistiani *et al.*, 2017).

Masyarakat pada masa digital mencerminkan situasi di mana interaksi sosialnya sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam konteks ini, masyarakat digital dapat diartikan sebagai keterkaitan antarindividu yang terwujud melalui pemanfaatan jaringan internet dan berbagai media atau platform khusus. Pada dasarnya, masyarakat digital konseptualnya erat kaitannya dengan masyarakat jejaring atau network society. Masyarakat jejaring tersebut dibentuk oleh struktur sosial yang terbentuk melalui teknologi mikroelektronik berbasis informasi digital dan teknologi komunikasi.

### **Peran Media Komunikasi dalam Pembangunan Nasional dan Daerah**

Posisi media semakin meningkat seiring munculnya beragam saluran informasi di tengah masyarakat. Kehadiran media menjadi elemen yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, baik itu di perkotaan ataupun di pedesaan. Saat ini, setiap jenis media, khususnya media sosial, memiliki dampak yang besar dalam memperluas jangkauan komunikasi manusia. Peran media massa sangat berarti sebagai pembawa pesan dan agen perubahan, yakni bertindak sebagai inisiator transformasi dalam ranah publik yang mampu memberikan pengaruh kepada masyarakat melalui berbagai jenis pesan seperti informasi, hiburan, edukasi, dan pesan-pesan lainnya, yang dapat diakses oleh masyarakat secara luas.

Pesan yang disampaikan oleh media massa berfungsi sebagai asupan kognitif bagi masyarakat, sehingga apa yang disajikan oleh media massa dapat memengaruhi pandangan subjektif individu dalam interaksi sosialnya. Hal ini disebabkan oleh peran sentral media

sebagai pandangan dunia bagi manusia. Pentingnya peran media dalam menyajikan informasi kepada publik dapat diinterpretasikan melalui lensa teori *agenda setting*. Teori ini, yang digagas oleh Maxwell McCombs dan Donal Shaw, menyatakan bahwa "media massa memiliki kapasitas untuk memindahkan isu-isu yang dianggap penting oleh mereka ke dalam agenda publik. Kita menganggap sebagai hal yang signifikan apa pun yang dianggap signifikan oleh media" (Khatimah, 2018).

K keberhasilan peran media massa sebagai agen perubahan tercermin dalam dampaknya terhadap individu dan masyarakat. Media tidak hanya mampu memengaruhi pengetahuan seseorang, tetapi juga membentuk cara seseorang memahami dunianya dan berinteraksi dengan sesama. Pengaruh media massa dapat diidentifikasi melalui tiga aspek; Pertama, aspek kognitif, yang berarti perubahan dari ketidaktahuan menjadi pengetahuan. Kedua, aspek afektif, yang mengindikasikan perubahan dari ketidaksetujuan menjadi persetujuan. Ketiga, aspek konatif, yaitu transformasi sikap dan perilaku (Khatimah, 2018).

Menurut Hassan, media massa memiliki peran yang sangat penting dalam konteks pembangunan, dan terdapat tiga fungsi utamanya. Pertama, media massa berperan dalam memberikan

informasi kepada masyarakat mengenai perkembangan nasional. Ini mencakup fokus pada kebutuhan untuk berubah, peluang perubahan, metode pelaksanaannya, dan bahkan peningkatan aspirasi. Kedua, media membantu masyarakat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dengan memperluas jalur dialog dan memastikan aliran informasi yang baik dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya. Ketiga, media massa berkontribusi dalam upaya pendidikan masyarakat, membekali mereka dengan keterampilan yang diperlukan (Suri, 2019).

Sarana komunikasi di negara-negara berkembang yang pada awalnya terbatas pada media cetak, telah mengalami transformasi yang signifikan. Kemajuan teknologi komunikasi, terutama melibatkan televisi, internet, dan telepon, telah mengubah lanskap komunikasi secara keseluruhan. Perkembangan ini mengakibatkan "jarak psikologis" menjadi lebih dekat, mengurangi "jarak geografis" antar bangsa. Meskipun begitu, di beberapa negara yang masih berkembang, kesenjangan informasi dalam sistem komunikasi tetap menjadi kenyataan. Kesenjangan komunikasi ini berpotensi menciptakan perbedaan persepsi mengenai pembangunan, yang pada gilirannya dapat menjadi hambatan bagi proses pembangunan itu sendiri.

Terdapat kecenderungan bahwa peran komunikasi menjadi terpinggirkan, bersifat aliran satu arah yang akibatnya menciptakan kesenjangan antara pemerintah dan masyarakat. Komunikasi dianggap hanya sekedar proses penyaluran informasi, tanpa mempertimbangkan keberagaman karakter masyarakatnya. Dampak yang nyata dari pandangan ini adalah ketertinggalan masyarakat dalam hal pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa komunikasi cenderung difokuskan pada peran sumber resmi yang bertindak sebagai inovator, dengan media massa sebagai saluran penyampaian, sementara masyarakat di tingkat lokal dianggap sebagai penerima pasif inovasi. Pendekatan komunikasi dalam praktik pembangunan diyakini banyak pihak mengalami kegagalan karena tidak sepenuhnya sesuai dengan prinsip pembangunan yang menitikberatkan pada kepentingan masyarakat.

Pendekatan partisipatoris memegang peranan kunci dalam meningkatkan kapasitas individu, kelompok, dan masyarakat di negara yang masih dalam tahap pembangunan, seperti Indonesia. Strategi komunikasi pembangunan melalui pendekatan partisipatoris menekankan komunikasi dua arah sebagai karakteristik utama komunikasi sosial, menggabungkan model analisis isi media dengan pendekatan yang berfokus pada audiens. Dalam praktik komunikasi pembangunan, hal tersebut memberikan peran dan tanggung jawab bersama kepada semua pihak yang terlibat dalam mendistribusikan informasi secara merata.

Penerapan partisipatoris, potensi lokal dan keragaman budaya dapat dimaksimalkan untuk mencapai kemandirian, mengurangi ketergantungan sebagai target pembangunan. Namun, penting untuk diingat bahwa penerapan metode ini tidak semudah yang terlihat. Faktor-faktor kompleks seperti aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik masyarakat memiliki dampak signifikan dalam penggunaan pendekatan ini. Untuk memastikan keberhasilan, langkah-langkahnya harus diambil secara kolaboratif antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat (Pramono, 2016). Hal ini dapat digambarkan melalui peran media massa dalam mendorong pertumbuhan sektor pariwisata daerah melalui penyajian informasi mengenai kekayaan kesenian budaya asli Papua, kecantikan alam laut pulau Papua, dan ragam kuliner khas Papua. Penyampaian positif dari liputan media massa ini sangat berarti dalam meningkatkan daya tarik pariwisata daerah. Melalui informasi yang disampaikan oleh media, masyarakat dapat mengetahui destinasi wisata yang mungkin belum dikenal oleh para wisatawan sebelumnya, memberikan potensi peningkatan pendapatan daerah. Tentu saja, hal ini dapat menjadi motivasi bagi daerah lain untuk mengembangkan industri pariwisata mereka (Muhsidin, 2019).

### **Potensi dan Tantangan Pembangunan Masyarakat Papua di Era Digital**

Dari segi potensi sumber daya alam, Provinsi Papua memiliki potensi yang besar, terutama dalam sektor hasil hutan. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan pertumbuhan produksi industri kayu, barang kayu, barang kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur), serta barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya mencapai 15,35% pada tahun 2019 (BPS Papua, 2019). Industri ini menjadi yang terbesar di Papua, mencakup 571 wilayah yang memilikinya. Total keseluruhan industri di provinsi ini menghasilkan 269 wilayah dengan produk barang unggulan, dan 7 di antaranya telah berhasil mengeksport produk-produk tersebut ke luar negeri. Keunikan lain dari provinsi ini terletak pada

aspek keberagaman agama, etnis, maupun bahasa. Ada sebanyak 1.743 wilayah dengan multi agama, 2.456 wilayah dengan multi etnis, dan 3.194 wilayah dengan multi bahasa. Tidak hanya itu, 103 wilayah di Papua telah mengembangkan tempat wisata untuk masyarakat umum (BPS Papua, 2022). Sektor pariwisata di Papua menjadi sangat menjanjikan, terutama di era digital ini, karena kekayaan alam, budaya, dan keanekaragaman hayati menjadikan Papua destinasi wisata yang menarik. Dari perspektif pembangunan sosial, sektor pariwisata di Papua dapat menjadi pendorong utama peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Potensi ekonomi Papua pada era digital ini dapat diperkuat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Akses yang lebih luas terhadap internet dan penggunaan smartphone membuka peluang baru untuk pengembangan sektor ekonomi, seperti e-commerce, pertanian digital, dan industri kreatif. Pemanfaatan teknologi juga dapat mempermudah akses masyarakat Papua ke informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Namun, di balik potensi tersebut, terdapat pula tantangan kompleks yang harus diatasi. Salah satunya adalah ketidaksetaraan dalam akses teknologi digital antara perkotaan dan perdesaan di wilayah tersebut. Meskipun infrastruktur digital berkembang, masih banyak daerah yang kesulitan terhubung dengan internet, menyebabkan sebagian besar wilayah Papua tidak dapat merasakan manfaat transformasi digital secara merata. Hal ini terlihat dari data provinsi tersebut, di mana 4.946 wilayah tidak memiliki stasiun pemancar, 1.378 wilayah memiliki sinyal telepon seluler yang lemah, dan 3.099 wilayah sama sekali tidak memiliki sinyal telepon seluler. Selain itu, 938 wilayah tidak memiliki sinyal internet untuk telepon seluler. Kesenjangan digital ini dikhawatirkan akan memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi (BPS Papua, 2022).

Tantangan lainnya yaitu kurangnya literasi digital dan keterampilan dalam teknologi informasi di kalangan masyarakat Papua. Meskipun era digital membuka peluang luas, pemahaman dan keahlian dalam memanfaatkan teknologi informasi masih seringkali rendah. Papua menempati kategori subindeks keahlian TIK dan juga subindeks akses dan infrastruktur TIK yang rendah pada periode 2021–2022 dengan angka masing-masing 4,97 dan 3,38, serta kategori subindeks penggunaan TIK yang sangat rendah di tahun yang sama sebesar 2,18.

Selain itu, Indeks Pembangunan TIK di Papua juga mencatat angka terendah dalam beberapa tahun terakhir, mencapai 3,22 pada tahun 2022 dengan penurunan dari tahun sebelumnya (BPS, 2023). Hal ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital dan berdampak negatif pada upaya pembangunan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan pembangunan sumber daya manusia yang terampil agar masyarakat dapat mengoptimalkan peluang digital.

Dalam konteks ekonomi, masih terdapat kendala terkait dengan integrasi pasar dan pemberdayaan ekonomi lokal. Sejumlah produk lokal di Papua masih menghadapi kesulitan untuk merambah pasar global, sebagian besar karena minimnya konektivitas dan pemahaman tentang strategi pemasaran digital. Kesenjangan yang signifikan terlihat dari jumlah daerah yang memiliki produk barang unggulan dan kemampuan ekspor yang sangat tidak seimbang. Oleh karena itu, langkah-langkah konkret diperlukan untuk meningkatkan daya saing produk lokal dan memastikan keterlibatan yang adil dalam ekonomi digital.

### **Sinergi Bela Negara Melalui Peningkatan Peran Komunikasi Pembangunan di Papua**

Komunikasi pembangunan memainkan peran krusial dalam mendukung perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat di Papua. Papua menjadi fokus perhatian sejak awal pemerintahan Joko Widodo. Beberapa instruksi dan kebijakan presiden telah dihasilkan untuk mendorong percepatan pembangunan di provinsi paling timur Indonesia. Terdapat tujuh strategi kunci yang diamanatkan oleh Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 guna mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua. Dua di antaranya adalah melibatkan pendekatan pembangunan yang berakar pada budaya, menghormati wilayah adat, dan berfokus pada Orang Asli Papua (OAP) dan menitikberatkan pada wilayah perbatasan, daerah terpencil, dan daerah tertinggal seperti pedalaman dan pegunungan. (Kompas Klasika, 2019).

RPJMN 2015 – 2019 memiliki prioritas kegiatan dalam pengembangan Papua di bidang informasi dan telekomunikasi guna meningkatkan komunikasi pembangunan kepada masyarakat.

Kegiatan tersebut meliputi pengembangan radio komunitas dan radio komunikasi, pembangunan menara penguat sinyal dan radio penguat siaran RRI dan TVRI, pendirian Media Center di setiap SKPD, pengembangan jaringan internet, dan pengadaan M-PUSTIKA berupa kendaraan roda dua dan roda empat (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua, 2012).

Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan yang mengedepankan inovasi, inklusivitas, harmoni sosial, dan demokrasi lokal dalam pembangunan Papua. Ini termasuk dukungan afirmatif terhadap peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua dan pengimplementasian Program Padat Karya Tunai (PKT). Pembangunan yang dilakukan pemerintah perlu diketahui oleh masyarakat agar tidak terjadinya konflik, maka dari itu diperlukan strategi – strategi dalam menjalankan komunikasi pembangunan di Papua.

Efektivitas komunikasi sangat dipengaruhi oleh strategi yang diterapkan dalam menyampaikan pesan. Quebral (1973) (dalam Bulamei, Koagouw, and Runtuwene 2017), menyatakan bahwa pada pendekatan pragmatis, mendefinisikan komunikasi pembangunan sebagai upaya komunikasi yang bertujuan untuk melaksanakan rencana pembangunan suatu negara. Oleh karena itu, komunikasi pembangunan dapat dianggap sebagai suatu inovasi yang diadopsi oleh masyarakat. Pembangunan saat ini perlu tumbuh dari lapisan masyarakat terendah (*grassroots*), menghargai keragaman budaya, serta menghormati martabat dan kebebasan individu dan komunitas. Dengan kata lain, pembangunan harus mengikuti paradigma yang berpusat pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, diperlukan partisipasi aktif, inisiatif, dan inovasi dari masyarakat itu sendiri (Armawan, 2021).

Para pakar komunikasi, khususnya di negara-negara berkembang, menunjukkan minat yang signifikan terhadap strategi komunikasi dalam konteks pembangunan nasional. Fokus mereka pada strategi komunikasi memiliki relevansi besar, mengingat bahwa efektivitas komunikasi sangat tergantung pada pilihan strategi yang diterapkan. Konsensus di kalangan ahli komunikasi menyarankan penggunaan pendekatan yang dikenal sebagai *AA Procedure*, yang merupakan singkatan dari *Attention to Action Procedure*. Pendekatan ini adalah penyederhanaan dari model AIDDA (*Attention, Interest, Desire, Decision, Action*), yang menunjukkan bahwa proses perubahan melalui komunikasi dimulai dengan menarik perhatian. Setelah perhatian tercapai, langkah selanjutnya adalah membangkitkan minat, sebagai tahap yang lebih tinggi dari perhatian.

Strategi komunikasi yang sukses dalam konteks pembangunan tidak hanya berkaitan dengan pembuatan pesan-pesan yang dapat berdampak pada target atau audien, tetapi juga melibatkan refleksi terhadap misi, tujuan, dan sasaran organisasi yang terintegrasi dalam operasi sehari-hari. Oleh karena itu, strategi tersebut memerlukan artikulasi yang jelas terkait

dengan audiens, kejelasan pesan, dan pemilihan media yang tepat. Keefektifan strategi komunikasi selalu dimulai dengan perencanaan yang solid dan matang, yang merupakan kunci kesuksesan dalam mencapai tujuan proyek.

Perencanaan yang baik dapat menjadi kerangka kerja bagi pelaksanaan misi komunikasi. Strategi ini akan membimbing langkah-langkah komunikasi, mulai dari persiapan hingga penyampaian pesan kepada publik. Pesan yang disusun harus sangat jelas untuk mencapai sasaran yang dituju, dan cara penyampaian pesan harus dipilih dengan cermat agar dapat mencapai target audiens. Untuk mencapai hal ini, penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam penyusunan perencanaan menjadi sangat penting. Pembentukan pesan yang menarik perhatian publik juga merupakan strategi efektif dalam komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penting untuk dapat menyusun pesan yang sesuai untuk berbagai kelompok audiens dan berbagai jenis media yang digunakan. Pemilihan jenis media yang sesuai akan memengaruhi kemampuan audiens untuk memahami isi pesan dengan cepat dan efektif.

Pertimbangan evaluasi selalu menjadi unsur penting dalam merancang strategi komunikasi, namun seringkali terabaikan. Evaluasi strategi komunikasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan data kuantitatif dan informasi kualitatif. Dalam aspek kuantitatif, kita perlu menilai sejauh mana target audiens telah dijangkau melalui berbagai media. Sementara itu, pada aspek kualitatif, kita harus menilai apakah pesan telah mencapai dampak yang diinginkan pada target audiens. Metode evaluasi ini berlaku baik ketika menggunakan berbagai jenis media maupun dalam berbagai kondisi audiens. Meskipun demikian, mengukur perubahan perilaku pada target audiens menjadi tantangan tersendiri. Komunikasi yang efektif memainkan peran penting dalam membantu masyarakat menemukan norma-norma baru dan mencapai harmoni dalam masa transisi. Dengan mengajarkan keterampilan baru, seperti baca tulis, serta memperkuat aspirasi, masyarakat lebih condong untuk berpartisipasi dalam pengambilan

keputusan yang memengaruhi mereka. Hal tersebut juga akan membuat program pemberdayaan masyarakat di Papua berlangsung dengan baik.

## KESIMPULAN

Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kaya akan potensi sumber daya alam (SDA). Papua menjadi salah satu provinsi yang memiliki beberapa daerah yang tertinggal dan menghadapi tantangan yang signifikan dalam hal pembangunan sosial ekonomi. Perkembangan teknologi digital telah membuka peluang besar bagi individu untuk berpartisipasi dalam komunitas dan kelompok organisasi berbasis virtual, dengan fokus pada minat, ketertarikan, atau tujuan yang sama, termasuk dalam gerakan sosial. Dengan mendorong akses informasi yang lebih luas, membangun kesadaran akan peluang ekonomi, dan menghubungkan masyarakat dengan sumber daya yang relevan, komunikasi pembangunan dapat berfungsi sebagai sinergi bela negara.

Implementasi sinergi bela negara menuju Papua yang gemilang dapat dilakukan dalam bentuk implementasi komunikasi pembangunan melalui penguatan jaringan komunikasi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat. Komunikasi pembangunan dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi digital, mempercepat penetrasi teknologi, serta meningkatkan aksesibilitas dan inklusi digital di wilayah Papua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armawan, I. (2021). Strategi Komunikasi Pembangunan Masyarakat. *Dawatuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 1(2), hlm. 84-95.
- BPS. (2023). *Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi 2022*. Retrieved November 18, 2023, from Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/publication/2023/09/29/cfa3a7c9e8b2397799ec6bb3/indeks-pembangunan-teknologi-informasi-dan-komunikasi-2022.html>
- BPS Papua. (2019). *Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan kecil Provinsi Papua Menurut KBLI (Persen)*. Retrieved November 18, 2023, from Badan Pusat Statistik Provinsi Papua: <https://Papua.bps.go.id/indicator/9/388/1/pertumbuhan-produksi-industri-manufaktur-mikro-dan-kecil-provinsi-papua-menurut-kbli.html>
- Bulamei, Elisabet Christin, Ferry V. I. .. Koagouw, and Anita Runtuwene. 2017. "Kajian Komunikasi Pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Peningkatan Infrastruktur Kota Manado." *Acta Diurna Komunikasi* 6(3):1-16.
- Fadli, Muhammad Rijal. 2021. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." 1271:33-54. doi: 10.21831/hum.v2i11.
- Iswara, P. (2023). *Infrastruktur Digital Solusi Atasi Ketimpangan di Papua*. Retrieved Oktober 22, 2023, from katadata: <https://katadata.co.id/padjar/infografik/63f32d6c6e172/infrastruktur-digital-solusi-atasi-ketimpangan-di-papua>
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Papua. (2012). *Kebijakan Pembangunan Bidang Kominfo Di Provinsi Papua*. Papua: Kominfo.
- Kompas Klasika. (2019, Desember 15). *Pemerintah telah menerbitkan peraturan yang mengedepankan inovasi, inklusivitas, harmoni sosial, dan demokrasi lokal dalam pembangunan Papua. Ini termasuk dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua dan pelaksanaan Program*. Retrieved November 18, 2023, from Adv Kompas: <https://adv.kompas.id/baca/percepatan-pembangunan-untuk-kesejahteraan-tanah-Papua/#:~:text=Tujuh%20strategi%20penting%20yang%20diamanatkan%20oleh%20Instruksi%20Presiden,lainnya%20melalui%20pemetaan%20operasi%20dan%20pekerjaan%20mitra%20pembangunan>
- Khatimah, H. (2018). Posisi dan Peran Media Dalam Kehidupan Masyarakat. *Tasâmuh*, 16(1), hlm. 119-



- 136.
- Lestari, S. A., Izzah, A. N., & Agustin, N. P. (2023). Online Shopping Habit Sebagai Budaya Masyarakat Mmodern (Studi Kasus Masyarakat Era Digital). *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*, 6(1), hlm. 129-138.
- Muhsidin. (2019). *Peranan Pers Membangun Peradaban Masyarakat Papua*. Retrieved November 18, 2023, from Antara News Papua: <https://Papua.antaranews.com/berita/478974/peranan-pers-membangun-peradaban-masyarakat-papua>
- Newman, Nic, Richard Fletcher, Craig Robertson, Kirsten Eddy, and Rasmus Nielsen. 2012. *Reuters Institute Digital News Report 2022*.
- Pemerintah Provinsi Papua. (2023). *Edukasi Pemilih Muda, RRI Gandeng Pemprov Dalam Gerakan Cerdas Memilih (GCM)*. Retrieved Oktober 10, 2023, from Papua.go.id: <https://www.Papua.go.id/view-detail-berita-8516/blog-details.html>
- Pramono, M. F. (2016). Komunikasi Pembangunan dan Media Massa: Suatu Telaah Historis, Paradigmatik dan Prospektif. *ETTISAL: Journal of Communication*, 1(1), hlm. 39-54.
- Putri, I. R. (2022). Aktivisme digital dan pemanfaatan media baru sebagai pendekatan. *Jurnal Magister Ilmu Komunikasi*, 8(2), hlm. 231-246.
- Suri, D. (2019). Pemanfaatan Media Komunikasi dan Informasi Dalam Perwujudan Pembangunan Nasional. *Jurnal Komunikasi Pembangunan*, 17(2), hlm. 177-187.
- Sulistiani, I., Sumardjo, Purnaningsih, N., & Sugihen, B. G. (2017). Peran Komunikasi Dalam Pengambilan Energi Sosial Masyarakat di Papua. *Jurnal Pikom*, 18(1), hlm. 43-56.